

Muslim Negarawan

(Spirit Kebangkitan Nasional, 20 Mei)

Riau Pos

KAMIS

20 MEI 2010.

Oleh **Luerdi**

PERUBAHAN sistem politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi telah membawa bangsa Indonesia pada ruang kebebasan berpolitik. Kebebasan berpolitik merupakan produk deferensial antara hari ini dengan masa lalu. Ramainya politisi dengan berbagai latar belakang merupakan konsekuensi logis dari kebebasan tersebut. Namun, keberadaan politisi tersebut nampaknya belum mampu menunjukkan perubahan mendasar yang diinginkan oleh bangsa ini. Politisi tidak seutuhnya dianggap sebagai pejuang kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya penambah beban penderitaan rakyat. Kekuasaan yang dimiliki kerap digunakan untuk membuat kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Bangsa ini telah menghadapi tiga kali pemilu pasca reformasi dan tahun 2009 yang lalu merupakan pemilu yang ketiga kalinya. Pemilu sebagai penyangga demokrasi telah menghasilkan dan mengganti sejumlah pemimpin, namun belum mampu menjadi obat penawar atas permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. Masalahnya selama ini kepemimpinan yang berkuasa merupakan kepemimpinan politisi bukan kepemimpinan negarawan. Model kepemimpinan ini telah menjadi fenomena baik di parlemen maupun eksekutif kita. Oleh karena itu, kepemimpinan nasional menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa ini di masa transisi demokrasi. Politisi adalah elit yang bertarung untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partainya. Mereka merindukan pemilu karena bisa menjadi sarana untuk memperoleh kekuasaan dan kemudian diarahkan untuk memenuhi kepuasan materi. Tidak mengherankan banyak dari mereka yang terlibat berbagai kasus korupsi, secara kasarnya merampok uang rakyat. Sedangkan negarawan adalah sosok yang berjuang untuk perbaikan dan kesejahteraan nasib rakyatnya, memajukan martabat bangsa, tidak sebaliknya mencekik rakyat sendiri dengan berbagai kebijakan yang tidak populis, atau menjatuhkan bangsa ini kedalam lembah hutang yang lebih dalam. Bagi mereka, politik merupakan alat untuk merealisasikan mandat rakyat.

Inilah kiranya yang membedakan secara te-

gas antara politisi dan negarawan. Di tengah-tengah krisis kepemimpinan negarawan di negeri ini, rakyat Indonesia masih tetap berharap dan memimpikan munculnya sosok pemimpin berkarakter yang benar-benar memberikan kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan membawa bangsa ini keluar dari berbagai permasalahan.

Muslim Negarawan

Muslim negarawan mungkin masih menjadi wacana yang belum familiar dihadapan publik Indonesia dan terkesan eksklusif hanya bagi kelompok gerakan tertentu. Ia terdiri dari dua kosa kata muslim dan negarawan. Pertanyaannya adalah mengapa muslim negarawan? Muslim menunjuk kepada manusia Indonesia yang beragama Islam, sedangkan negarawan menunjuk kepada sosok yang bermental membangun dan memajukan bangsa dan negaranya. Muslim negarawan seyogyanya dipahami secara integral, tidak secara parsial. Ia tidak dimaksudkan sebagai pengenalan atribut identitas *an sich*, akan tetapi menunjuk kepada kepribadian seorang negarawan dengan tidak melupakan realitas latar belakang sejarah dan manusia Indonesia.

Ia tidak menunjuk kepada sosok negarawan sekuler. Kiranya ini wajar mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan sejarah telah mencatat berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para ulama dan intelektual muslim dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, tercatat Muhammad Natsir sebagai negarawan yang dianggap representasi muslim ideologis dalam sejarah. Mosi integral Natsir merupakan wujud sikap seorang negarawan untuk menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara Indonesia dari cengkaman penjajah kala itu.

Ada beberapa karakter konsep kepemimpinan muslim negarawan dengan berbagai kompetensi kritis yang harus dimiliki, yaitu; *Pertama*, ideologi Islam yang mengakar. Bagaimanapun ideologi akan mempengaruhi kepribadian dan sikap seseorang, terlepas apapun ideologinya. Memang kecenderungan saat ini ideologi tidak

lagi ditampilkan secara formal-legalistik, akan tetapi nilai-nilainya masih tetap eksis dan ditransformasikan dalam berbagai bentuk perilaku politik. Memiliki pengetahuan dan pemahaman ke-Islaman merupakan kompetensi kritis yang harus dipenuhi dalam tataran ini. Sehingga dalam mencari berbagai jawaban atas persoalan bangsa, cara pandang Islam tetap menjadi *framework* acuan.

Kedua, idealis dan konsisten. Karakter ini menggambarkan sosok yang berpikir, bergerak, dan bertindak berangkat dari nilai-nilai ideal. Tidak sebaliknya hanya dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis keuntungan pribadi dan kelompok sesaat. Idealisme akan melahirkan konsistensi perjuangan. Tidak akan ada konsistensi perjuangan yang akan *survive* dan *sustainable* tanpa didukung oleh idealisme. Kompetensi kredibilitas moral merupakan produk dari idealisme dan konsistensi tersebut.

Ketiga, basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan. Seorang pemimpin seharusnya berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan ilmiah dan pemikiran yang mapan dalam melakukan rekonstruksi bangsa. Tidak sebaliknya dengan sikap dekonstruksi yang akan membawa bangsa ini ke jerat masalah yang lebih dalam. Berkaitan dengan hal ini, wawasan ke-Indonesiaan menjadi kompetensi yang harus dimiliki. Dengan demikian pemecahan permasalahan bangsa akan berkaitan dengan cakrawala ke-Indonesiaan, penguasaan realitas kebijakan publik yang terintegral dengan pengetahuan interdisipliner.

Kepakaran dan profesionalisme juga menjadi kompetensi berikutnya. Sisi ini akan menjadikan seorang pemimpin sebagai *decision maker* yang kemudian menjadi referensi publik yang diperhitungkan dalam upaya pemecahan permasalahan bangsa. *Keempat*, berkontribusi pada pemecahan permasalahan umat dan bangsa. Sisi ini menunjukkan kompetensi kepemimpinan dari sosok negarawan. Kepemimpinan nasional selayaknya menjadi jawaban atas kompleksnya

permasalahan yang sedang dihadapi, tidak sebaliknya menambah beban keterpurukan umat dan bangsa. Kepemimpinan yang berkarakter, kuat dan integral akan mempengaruhi akselari perubahan bagi Indonesia.

Kelima, perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan. Dibutuhkan kemampuan sosok negarawan untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah-tengah pluralisme Indonesia. Kemampuan mengkomunikasikan ide dan gagasan perbaikan nyata bangsa kepada elit dan berbagai lapisan masyarakat menjadi syarat mutlak agar upaya perbaikan bangsa tersebut dapat menjadi tanggungjawab bersama. Tidak sebaliknya hanya dipikul oleh sekelompok orang tertentu saja. Dengan demikian diplomasi dan jaringan menjadi kompetensi kritis yang mendukung karakter ini.

Indonesia merupakan negara yang besar. Secara geografis luasnya sama dengan 20 negara Eropa, seluas dari timur ke barat membentang dari Georgia hingga Irlandia, dan dari utara ke selatan membentang dari Moskow Rusia hingga Athena Yunani. Sangat disayangkan bila Indonesia yang besar ini akan tetap terpuruk dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, ditambah lagi dengan perilaku pongah para elit politisi yang memalukan.

Bagaimanapun kebangkitan suatu bangsa juga akan ditentukan oleh keberadaan negarawan di antara bangsa tersebut. Momentum kebangkitan nasional kali ini tentunya memberikan harapan kepada kita akan munculnya sosok pemimpin yang benar-benar berkarakter negarawan suatu saat nanti. Kita sudah muak dengan kepemimpinan politisi yang telah berkali-kali mengkhianati amanah rakyat. Tapi kita yakin bahwa sosok negarawan bukanlah utopia di negeri ini. Dan muslim negarawan merupakan tawaran bagi kepemimpinan nasional Indonesia yang tangguh. Bahkan konsep tersebut juga relevan untuk kepemimpinan di daerah. Semoga tulisan ini dapat menambah wacana kepemimpinan ideal di tengah-tengah krisis kepemimpinan bangsa.***

Luerdi SIP,

Koordinator Departemen Kebijakan Publik KAMMI Daerah Riau.